

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA
ALAM BANTIMURUNG DI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diusulkan oleh

HASNI MADDIMUNRI

Nomor Stambuk 10561 3295 09



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015**

PENGAJUAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA
ALAM BANTIMURUNG DI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

HASNI MADDIMUNRI

Nomor Stambuk 10561 3295 09

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi
Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata
Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Hasni Maddimunri

Stambuk : 10561 3295 09

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si

Dra. Andi Rosdianti Razak, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat keputusan / Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0894/FSP/A.1-VIII/V/36/2015, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari selasa tanggal 05 bulan Mei Tahun 2015.

Tim Penilai:

Ketua.

Sekretaris

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ()
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si ()
3. Dra. Andi Rosdianti Razak, M.Si ()
4. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hasni Maddimunri
Nomor Stambuk : 10561 3295 09
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2015

Yang Menyatakan

Hasni Maddimunri

ABSTRAK

Hasni Maddimunri. 2015. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. (Dibimbing oleh Muhajirah Hasanuddin dan A.Rosdianti Razak)

Peran Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung adalah peran Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah regulator adalah peran pemerintah dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Peran sebagai motivator adalah peran pemerintah dalam menyediakan informasi kepariwisataan, selain itu menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan juga banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data terdiri dari triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan belum efektif, dengan alasan karena peran pemerintah sebagai regulator belum mampu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam, karena pengelolaan pengembangan potensi wisata belum terkelola sesuai dengan perundangan. sedangkan Peran pemerintah sebagai fasilitator mampu menyediakan sarana prasarana, fasilitas wisata meskipun belum memadai, memiliki SDM yang berkualitas meskipun kuantitasnya minim, dan peran pemerintah sebagai motivator menyediakan informasi kepariwisataan dan pemasaran melalui media cetak dan media elektronik, memberikan bimbingan dan penyuluhan usaha serta pelatihan berbahasa asing kepada pegawai dan masyarakat lokal serta melestarikan penangkaran kupu-kupu yang telah menjadi ciri khas obyek wisata alam Bantimurung agar tidak punah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengembangan Potensi Wisata Alam

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hasan Maddimunri, S.Pd (Alm) dan Ibunda Maniaga Dg Matta yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan pelajaran yang berharga. Kepada yang terhormat Ibu DraHj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si sebagai pembimbing pertama dan Ibu Dra. A. Rosdianti Razak, M.Si sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Kakak tercinta Abd. Rahman Maddimunri, S.Pd, Arifuddin Hasan Maddimunri, S.Pd, dan Iumiati Maddimunri, A.MdKep yang selalu memberi saya semangat “ dan dorongan untuk menjadi orang yang sukses dalam meraih gelar sarjana..

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Irwan Akib, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini.
4. Ibu Dra. Musliha Karim, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan saya saran dan nasehat-nasehat yang berguna selama saya menjalani masa perkuliahan hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
6. Drs. H. Rahmat Burhanuddin, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
7. Segenap pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian.
8. Sahabat-sahabat saya yang tak pernah bosan memberikan motivasi, serta seluruh rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2009 dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan tiada manusia yang luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga saran dan kritik tersebut menjadi motivasi kepada penulis untuk lebih tekun lagi belajar. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, 2015

Penulis

Hasni Maddimunri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIA.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Peran Pemerintah	7
1. Pengertian Peran	8
2. Pengertian Pemerintah	
B. Konsep Pariwisata	10
1. Pengertian Pariwisata	10
2. Potensi Pariwisata.....	14
3. Macam Potensi Pariwisata.....	16
4. Pengembangan Pariwisata	17
5. Tujuan Pengembangan Pariwisata.....	18
6. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata.....	19
C. Kerangka Pikir.....	22
D. Fokus Penelitian	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Keabsahan Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
B. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	36
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengenai pemerintahan daerah ditentukan bahwa karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam wilayahnya yang juga berbentuk negara. Wilayah negara Indonesia di bagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Maksud dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Pembangunan pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khususnya perlu memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan non fisik. Hal ini untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berlebihan, oleh karena itu pembangunan di sektor pariwisata hendaknya memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan adalah pengembangan pariwisata yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata lain pengembangan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan nilai budaya.

Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, salah satunya adalah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung adalah kawasan konservasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Sebagai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung mengemban fungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pun mengamanatkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung telah sejak lama difungsikan sebagai objek tujuan wisata, bahkan Taman Wisata Bantimurung justru menjadi objek wisata andalan di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama bagi Kabupaten Maros setelah pertambangan. Julukan '*The Kingdom of Buttedly*', fenomena air terjun di sela-sela tebing karts dan *landscape*

karts yang fenomenal merupakan objek daya tarik wisata utama yang ditawarkan oleh lokasi wisata Bantimurung.

Tak terbatas pada potensi wisata Bantimurung, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung masih memiliki potensi objek dan daya tarik wisata lainnya. Pattunuang, Bulusaraung, gua-gua alam, gua-gua prasejarah, terjalnya tebing karst, atraksi satwa *Macaca maura* di Karaenta, dan atraksi kupu-kupu yang merupakan *flagship* kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung serta sejumlah objek dan daya tarik wisata lainnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai lokasi wisata alam untuk menopang pendapatan dan devisa Negara. Penyelenggaraan wisata alam pun turut menyediakan alternatif mata pencaharian baru dan peluang berusaha bagi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Ini menunjukkan bahwa objek wisata yang lain terkesan belum memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Maros. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Maros mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan di sektor wisata dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 pasal 7 tentang pengembangan potensi pariwisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan daerah, sehingga tolak ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata, akan tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dalam penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, Sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (Tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas. Sementara itu peran pemerintah sebagai motivator yaitu kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Potensi pariwisata Bantimurung perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah kabupaten Maros. Mencermati latar belakang di atas maka penulis tertarik

mengangkat judul *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas pariwisata Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan dapat menambah pengetahuan tentang peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran

Menurut Poerdarminta (2003) peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, jadi peran merupakan suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan.

Rivai (2006:148) mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup 3 hal berikut ini :

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Soekanto (2005:268) mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran-peran itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat, maksudnya : kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh “masyarakat” didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peran-peran lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, peran mencakup tiga aspek. *Pertama*, peran merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat. Perilaku seseorang yang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. *Kedua*, peran merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. *Ketiga*, peran merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Pengertian Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata ”perintah” yang kemudian mendapat imbuhan ”pe” menjadi kata ”pemerintah ” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Dalam kata dasar ”perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.

- b) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c) Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah, serta
- d) Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Pemerintah juga merupakan satu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan proses kegiatannya disebut pemerintahan dan besar kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, dengan demikian pemerintah dalam menjalankan proses kegiatan Negara harus berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu negara.

Menurut Ndraha (2003:6) pemerintah adalah Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah

Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Sementara Finer dalam Syafi'ie (2001:46), menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*process*), wilayah negara tempat

kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*), dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Montesquieu dalam Salam (2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan Undang-Undang).

B. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. (Yoeti, 2001 : 43)

Menurut Hunziker dan Krapf dalam Ilyas (2009), pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Freuler dalam Pendit (2002:34) merumuskan pengertian pariwisata dalam arti modern yaitu pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya

disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan.

Menurut Marpaung dan Bahar dalam Sihite (2000:46) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk, sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan ' atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Sektor Pariwisata secara luas adalah kegiatan rekreasi diluar domisili melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat negara maju dan sebagian keeii masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manuasia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan

organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, dan sebagainya (Damanik dan Weber, 2006).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 4 menyatakan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Wahab (2003:9) memberikan ringkasan mengenai manfaat pariwisata bagi , suatu negara yang dapat dijabarkan sebagai faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat dan cita rasa yang beraneka ragam. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional misalnya:

- a. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan pembangunan dan pembaharuan fasilitas wisata. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan prasarana dan suprasarana pariwisata.

- b. Menggugah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata misalnya: usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain), yang memerlukan perluasan beberapa industri seperti misalnya: peralatan hotel dan kerajinan tangan.
- c. Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian.
- d. Memperluas pasar barang-barang lokal.
- e. Menunjang pendapatan negara dengan valuta asing sehingga mengurangi devisa dalam neraca pembayaran dan memajukan perekonomian nasional.
- f. Memberi dampak positif pada tenaga kerja di negara, karena pariwisata memperluas lapangan kerja baru (tugas baru) di hotel atau di tempat penginapan lainnya, usaha perjalanan, di kantor-kantor pemerintah yang mengurus pariwisata-pariwisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cendera mata, serta tempat-tempat penjualan lainnya.

2. Potensi Pariwisata

Menurut Poemadarminta (2003:908) pengertian potensi adalah Kesanggupan, kekuatan, kemampuan. Sedangkan Soekadijo (1997:50) menjelaskan pengertian potensi pariwisata dengan menggunakan istilah modal kepariwisataan (*tourism assets*) atau sering juga disebut sumber kepariwisataan (*tourism resources*).

Pendit (1999:21) menerangkan bahwa potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata. Dengan kata lain, potensi wisata adalah berbagai sumber

daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (*tourist attraction*) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan baik yang berasal dari lingkungan alam yang dapat mendukung peri kehidupan manusia maupun suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi pariwisata merupakan suatu kemampuan dari objek wisata yang berasal dari alam seperti keindahan alam, iklim, pantai, pegunungan, goa dan sebagainya maupun hasil budi daya manusia seperti candi, monumen, peninggalan purbakala, kesenian dan sebagainya yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung kemajuan kepariwisataan disuatu tempat atau daerah tertentu.

Potensi pariwisata yang dikembangkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Potensi pariwisata yang juga disebut dengan modal kepariwisataan atau sumber daya wisata, pengembangannya sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan manusia. Sumber daya wisata dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia menjadi suatu objek wisata yang dapat memenuhi keinginan wisatawan, sumber daya potensial (unsur-unsur lingkungan yang akan menjadi sumber daya aktual) maupun fasilitas buatan manusia. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan wisatawan untuk mengunjungi,

melakukan aktivitas dan kembali ke tempat asalnya sehingga mereka mendapatkan kepuasan dari kegiatan wisata yang telah mereka lakukan.

Karyono (1997:28) mengemukakan bahwa agar suatu daerah tujuan Wisata mempunyai daya tarik maka harus mempunyai 3 syarat daya tarik yaitu: ada sesuatu yang bisa dilihat (*something to see*), ada sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*) dan ada sesuatu yang bisa dibeli (*something to buy*)”.

3. Macam Potensi Pariwisata

Soekadijo (1997:51) menyatakan bahwa “Modal atau potensi pariwisata dapat berupa alam, kebudayaan dan manusia itu sendiri”. Lebih lanjut mengenai potensi tersebut akan...dijelaskan sebagai berikut :

a) Potensi alam

Yang dimaksud dengan potensi alam adalah alam fisik, fauna dan floranya. Suatu daerah yang memiliki potensi alam ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi,

b) Potensi kebudayaan

Yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian tetapi juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup di tengah-tengah suatu masyarakat.

c) Potensi manusia

Manusia dapat menjadi atraksi wisata yang dapat menarik kedatangan Wisatawan. Wisatawan dapat tertarik untuk mengunjungi suatu daerah karena sikap ramah tamah dari masyarakat setempat.

4. Pengembangan Pariwisata

Menurut Poerwadarminta (2003:556) pengembangan merupakan perbuatan (hal,cara,usaha) mengembangkan. Fandeli (1999:27) mengemukakan Pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada:

- a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan wirausaha skala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berpotensi pada teknologi komparatif.
- d. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Yoeti (2001:20) menjelaskan tentang pengertian pengembangan pariwisata dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu pengembangan produk baru dan pengembangan atraksi wisata yaitu:

- a. Pengembangan produk baru

Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan. Pengembangan produk baru meliputi perbaikan pelayanan (*service*) semenjak seorang wisatawan meninggalkan tempat kediamannya sampai ke tempat atau objek yang dituju sampai kembali ke tempat asalnya.

b. Pengembangan atraksi wisata

Atraksi wisata adalah peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara periodik, baik yang bersifat tradisional maupun dilembagakan dalam kehidupan masyarakat modern, mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk menyaksikan atau menghadirinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menggali, memperbaiki dan memajukan potensi yang ada di suatu daerah. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi pendapatan secara merata.

5. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang penting. Bahkan sektor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Sehingga pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia. Tujuannya adalah agar lebih banyak wisatawan datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya selama berkunjung ke Indonesia.

Pada dasarnya tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Yoeti (2001:22) bahwa Pengembangan kepariwisataan nasional, dengan tujuan untuk memperlancar usaha kepariwisataan nasional

sebagai salah satu sumber penghasil devisa negara perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja badan pelaksana dibidang kepariwisataan tingkat pusat.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan objek wisata perlu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan pengembangan objek wisata. Faktor-faktor tersebut merupakan unsur yang menentukan pengembangan objek wisata. Pendit (2002) pelaksanaan pengembangan pariwisata di Indonesia mendasarkan pada konsep perwilayahan, Hal ini mengingat bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri dari banyak pulau dan beraneka ragam objek bermutu tinggi yang tersebar di berbagai tempat, baik yang merupakan atraksi tidak bergerak seperti keindahan alam, monumen, candi dan sebagainya maupun atraksi bergerak yang sangat tergantung pada upaya manusia dalam mengembangkannya seperti kesenian, adat istiadat, seremoni, perayaan, pekan raya dan sebagainya.

Perwilayahan dalam dunia kepariwisataan adalah pembagian wilayah-wilayah pariwisata yang dapat dipandang memiliki potensi, yang selanjutnya dapat dijadikan tujuan yang pasti. Dalam pengertian ilmiahnya wilayah ini disebut daerah tujuan wisata (*tourist destination area*), yang memiliki batasan-batasan sebagaimana dijelaskan oleh Pendit (2002:66) yaitu yang dimaksud dengan wilayah pariwisata adalah tempat atau daerah yang karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalu lintas dan fasilitas-fasilitas kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan. Definisi tersebut

memberikan penjelasan bahwa ada tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata yaitu :

- a. Memiliki atraksi atau objek yang menarik
- b. Mudah dicapai dengan alat-alat kendaraan
- c. Menyediakan tempat untuk tinggal sementara

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan guna memperoleh hasil yang optimal hendaknya memperhatikan faktor-faktor penentu pengembangan suatu daerah tujuan wisata yaitu.

- 1) Tersedianya objek wisata atau atraksi yang dapat dinikmati atau disaksikan, baik yang berasal dari alam maupun hasil budi daya manusia.
- 2) Tersedianya sarana transportasi dan perhubungan.
- 3) Tersedianya komponen penunjang yang berupa akomodasi dan infrastruktur

Adanya atraksi wisata yang menarik merupakan faktor utama dalam pengembangan pariwisata. Akan tetapi pengembangan tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung suatu daerah tujuan wisata.

Sarana kepariwisataan menurut Karyono (1997:74) adalah Perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan. Dalam hal prasarana yang harus tersedia dikawasan wisata, Wahab sebagaimana yang dikutip oleh Karyono (1997:74) membagi prasarana

menjadi tiga kelompok yaitu prasarana umum, kebutuhan pokok pola hidup modern dan prasarana wisata.

- 1) Prasarana umum, meliputi: Sistem penyediaan air bersih, Kelistrikan, Jalur-jalur lalu lintas, Sistem pembangunan limbah, Sistem telekomunikasi.
- 2) Kebutuhan pokok pola hidup modern Misalnya rumah sakit, apotek, bank, pusat-pusat perbelanjaan, salon, kantor-kantor pemerintahan dan pompa-pompa bensin.
- 3) Prasarana wisata, Prasarana yang diperuntukkan bagi wisatawan yang meliputi tempat penginapan, tempat dan kantor informasi, tempat promosi, tempat-tempat rekreasi dan sport.

Pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui usaha pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

Sehubungan dengan pembangunan pariwisata perlu adanya perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pariwisata hendaknya mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dan kebutuhan wisatawan, sehingga wisatawan akan merasa nyaman dan senang berkunjung ke suatu objek wisata.

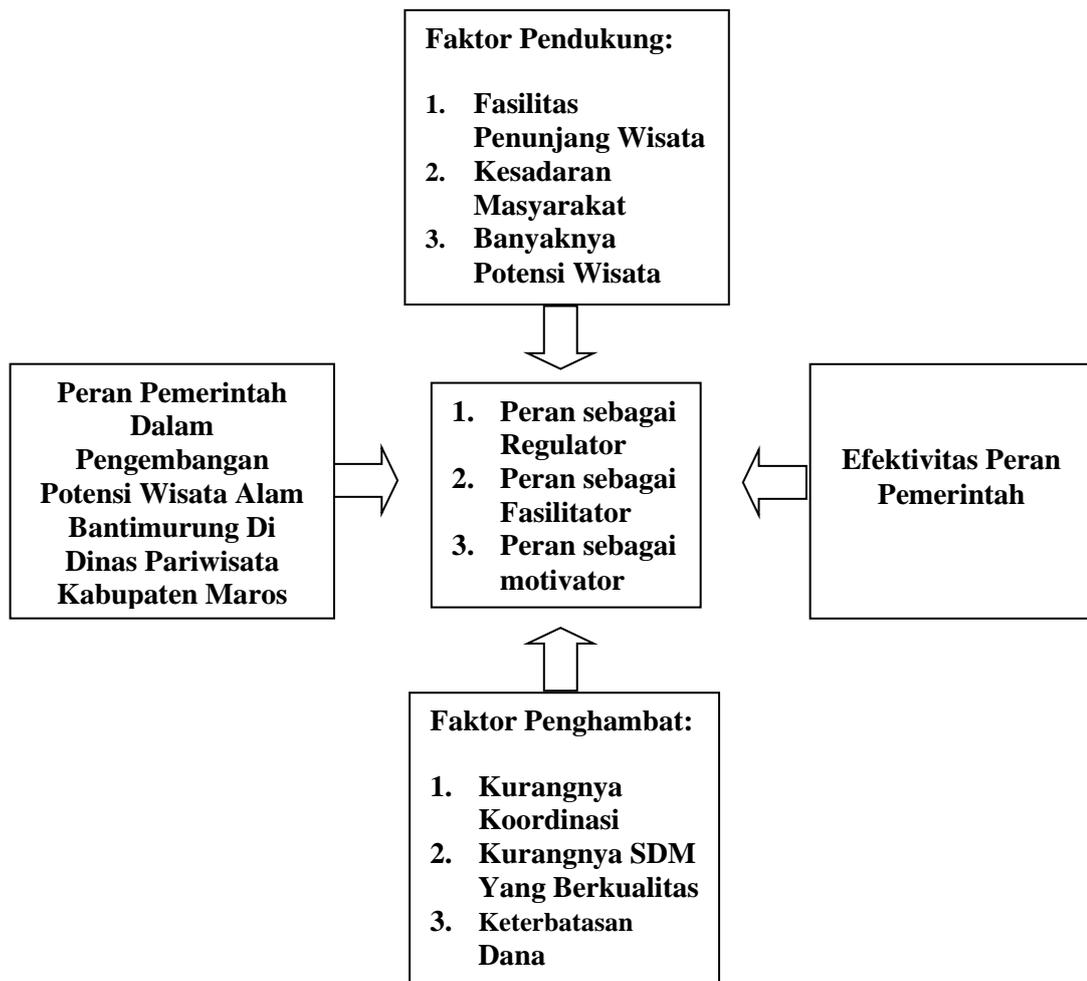
C. Kerangka Pikir

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya adalah mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata dan daya tarik wisata yang merupakan potensi daerah yang dimiliki.

Kihin (2013) Pengembangan pariwisata akan mencapai hasil yang optimal bila didukung oleh peran pemerintah sebagai regulator yaitu peran pemerintah dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi Pembangunan). Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Salah satu fasilitas penunjang paling utama adalah akses masuk menuju kawasan wisata tersebut. Kemudian Pemerintah sebagai motivator adalah peran pemerintah dalam menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, selain itu menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan juga banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan selain itu memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan potensi-potensi pariwisata. Potensi-potensi tersebut apabila dikembangkan akan dapat menarik wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menaikkan pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut dapat digambarkan diagram alur pemikiran sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dalam mengembangkan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata yaitu peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dalam pengembangan potensi pariwisata Bantimurung Kabupaten Maros.
2. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yang menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan) dalam rangka pengembangan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna pengembangan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros.
4. Peran pemerintah sebagai motivator yaitu peran Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sebagai motivator yang menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, selain itu menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros.
5. Efektivitas peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros yaitu hasil yang diharapkan dari Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros.

6. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang menjadi penunjang terselenggaranya pengembangan potensi pariwisata pada objek wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros yang terdiri dari :
 - a. Fasilitas Penunjang Wisata
 - b. Kesadaran Masyarakat
 - c. Banyaknya Potensi Wisata

7. Faktor Penghambat adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat terselenggaranya pengembangan potensi pariwisata pada objek wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros yang terdiri dari:
 - a) Kurangnya Koordinasi
 - b) Kurangnya SDM yang Berkualitas
 - c) Keterbatasan Dana

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu 2 (dua) bulan yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2014 sampai dengan Bulan Februari 2015. Adapun lokasi penelitian yaitu pada objek wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa Wisata alam Bantimurung merupakan tempat wisata yang mempunyai potensi sebagai wisata lokal. dan Karena Bantimurung merupakan suatu tempat yang cukup produktif sehingga perhatian dari pemerintah Kabupaten Maros perlu ditingkatkan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau yang menggambarkan tentang hal-hal yang mau diteliti yaitu mengenai peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Staf, serta masyarakat dan pengunjung yang dapat memberikan keterangan yang terkait dalam penelitian.
2. Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku, dokumen dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini merupakan orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan keterangan sesuai dengan situasi dan kondisi objek penelitian. Informan juga harus berbentuk *adjective*, karena akan mempengaruhi valid atau tidaknya data yang kita teliti, dan hal itupun akan mempengaruhi keabsahan data yang kita teliti. Adapun Informan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 01 Daftar Nama-Nama Informan

NO	INISIAL	JABATAN/STRATA	KET
1	RB	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
2	RM	Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
3	HN	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
4	RS	Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional	1 Orang
5	AG	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
6	TA	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Orang
7	MR	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
8	HA	Seksi Pengolaan Objek dan Daya Tarik Wisata	1 Orang
9	MS	Masyarakat	1 Orang
10	RD	Satpol PP Dinas Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
11	AR	Masyarakat/Pemilik Art Shop	1 Orang
12	MA	Pengunjung Objek Wisata	1 Orang
13	FA	Pengunjung Objek Wisata	1 Orang
Jumlah			13 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Observasi

Insntumen penelitian ini digunakan didalam pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilalmlkan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian,

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses

pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (.2012 : 334) Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang hal-hal yang akan diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data menurut Miles and Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2012: 368) ada tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,

membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangannya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak pada posisi 40° 45 Lintang Selatan dan 109° 20' 129 12' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Maros memiliki luas Wilayah 161.311 Km² yang meliputi lahan persawahan, kebun, pemukiman lahan kering, perkebunan, hutan dan padang rumput. Secara administratif Kabupaten Maros terbagi menjadi 14 Kecamatan, 103 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Maros mencapai 278.259 jiwa dengan kepadatan penduduk 168 jiwa per Km. Mayoritas penduduk Kabupaten Maros adalah suku Bugis. Meski demikian terdapat pula suku Makassar dan suku lainnya. Hubungan antar suku terjalin hubungan yang sangat homogen sehingga timbullah watak dan karakter khas Maros yang agamis, dinamis, kreatif sopan dan ramah. Untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maros disamping di dukung dengan dana APBN/APBD juga mendapatkan sumber dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah berupa dana alokasi umum (DAU). Selain sektor pariwisata yang cukup signifikan berkontribusi dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, potensi ekonomi

lain yang turut menyumbangkan sumber pendapatan daerah adalah sektor pertanian dan pertambangan. Kabupaten Maros sebagai kota yang terletak di sebelah utara Makassar dengan keberadaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin mempunyai peranan yang sangat Vital baik yang sifatnya lokal, regional maupun internasional.

Keberadaan fungsi dan peranan tersebut menjadikan Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir terutama sejak dibukanya jalur-jalur khusus internasional transportasi udara dengan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana dengan standar internasional karena itu sudah sewajarnya bila fungsi dan peranan. Kabupaten Maros sebagai kota persinggahan para wisatawan/pengunjung lokal maupun mancanegara, dipertegas mengingat kawasan ini mempunyai prospek dan potensi wisata yang cukup besar.

2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Maros

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yaitu masyarakat Maros yang sejahtera dengan karakter dan jati diri yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya melalui pemerintahan yang baik dan profesional. Visi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Maros ini dibangun berdasarkan Visi Bupati Maros periode 2011-2015 yaitu mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan beriman ,. melalui pemerintahan yang bersih dan profesional.

Misi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yaitu:

- a) Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, pengembangan Objek wisata yang berkelanjutan serta pemasaran yang bertanggungjawab.

- b) Melestarikan dan menjunjung tinggi nilai keragaman dan kekayaan budaya. dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Maros.
- c) Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata.
- d) Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan professional.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Maros

a) Tujuan Strategis:

- 1) Mengembangkan kepariwisataan yang dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya.
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata dan kebudayaan.
- 5) Mewujudkan Pengelolaan Tugas dan fungsi. dinas Pariwisata dan kebudayaan yang bersih dan professional.

b) Sasaran Strategis :

- 1) Dalam Mengembangkan Kepariwisataan, sasaran yang akan dicapai yaitu:
 - a) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Maros dan pergerakan wisatawan lokal dan domestik.
 - b) Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditandai ,dengan hal-hal sebagai berikut; Peningkatan

penerimaan dari retribusi pengelolaan Objek wisata pertahun sampai dengan tahun 2015.

- c) Mendukung Diversifikasi Produk Wisata Daerah, yang ditandai dengan Bertambahnya Objek wisata baru yang potensial antara lain; Objek Wisata Sungai Maros, Objek Wisata Sungai Pute (Rammang-Rarnrnang) dan Objek Wisata Air Terjun Lacolla.
- 2) Dalam Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, sasaran yang akan dicapai yaitu :
 - a) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, yang ditandai dengan jumlah karya budaya yang di Revitalisasi dan di inventarisasi
 - b) Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya, yang ditandai oleh lahirnya Perfilman Daerah dan Penghargaan terhadap pelaku budaya
 - c) Meningkatnya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya, yang ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana kesenian yang Representatif.
- 3) Dalam Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, sasaran yang akan dicapai yaitu :
 - a) Terwujudnya penetapan dan pengelolaan benda cagar budaya, yang ditandai dengan jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara.
 - b) Terwujudnya museum Daerah, yang ditandai dengan tersedianya museum daerah yang Representatif.
- 4) Dalam Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata dan kebudayaan, sasaran yang akan dicapai yaitu :

- a) Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata, yang ditandai dengan meningkatnya lulusan sekolah/ perguruan tinggi kepariwisataan yang terserap di bidang kepariwisataan
 - b) Meningkatnya kapasitas daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- 5) Dalam Mewujudkan Pengelolaan Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersih dan professional, sasaran yang akan dicapai yaitu:
- a) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
 - b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Bantimurung

Pengembangan sektor pariwisata dewasa ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan keinginan manusia, kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dalam bentuk fisik, kejiwaan dan intelektual. Keterlibatan publik memberikan pengaruh bagi peningkatan sektor pariwisata. Perencanaan sebagai suatu konsep untuk menerawang kedepan dan mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dapat terjadi akibat pengembangan sektor pariwisata dan merupakan satu satunya cara untuk dapat memperoleh manfaat dari sektor

pariwisata. Idealnya suatu daerah wisata, disamping memerlukan akomodasi, fasilitas pendukung, serta infrastruktur (jalan, air dan komunikasi) akan disebut-sebut sebagai daerah tujuan wisata apabila ia memiliki atraksi-atraksi ini antara lain: panorama dan keindahan alam. Pengembangan Objek wisata tidak selamanya harus berorientasi kepada wisatawan mancanegara, tetapi justru wisatawan nusantara perlu mendapatkan perhatian lebih, beberapa Objek wisata yang telah dikembangkan sesuai dengan arah perkembangan pariwisata propinsi Sulawesi Selatan.

1. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator yaitu peran pemerintah dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan)

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pun mengamanatkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung telah sejak lama difungsikan sebagai Objek tujuan wisata, bahkan taman wisata Bantimurung justru menjadi Objek wisata andalan di Propinsi Sulawesi Selatan dan menjadi sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang utama kedua bagi Kabupaten

"Maros setelah pertambangan. Penyelenggaraan wisata alam pun turut menyediakan alternatif matapecaharian baru

dan peluang berusaha bagi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan taman

nasional. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi" tanggung jawab

Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dalam mengembangkan pemberdayaan daerah penyangga kawasannya. terkait dengan uraian di atas, informan RS selaku Kepala seksi pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Dinas Pariwisata Kabupaten Maros mengatakan:

“Dalam upaya pengembangan wisata alam, ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu Pengaturan kelembagaan dalam aspek koordinasi ' Tingkat Propinsi, Kabupaten/kota dan pusat), Aspek regulasi, pengaturan kewenangan, dan lain-lain, Aspek SDM, agar ada training, juga melibatkan masyarakat setempat, Aspek penganggaran, saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah, dan Pengembangan agenda yang terpadu.”,(Hasil wawancara RS, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RS, dapat disimpulkan bahwa ada lima hal yang perlu. diperhatikan dalam pengembangan wisata alam yaitu a) Pengaturan kelembagaan dalam aspek koordinasi Tingkat Propinsi, Kabupaten/kota dan pusat); b) Aspek regulasi, pengaturan kewenangan, dan lain-lain; 0) Aspek SDM, agar ada training, juga melibatkan masyarakat setempat; d) Aspek penganggaran, saling mendukung antara Pemerintah Pusat dan Daerah; e) Pengembangan agenda yang terpadu.”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan Peran Pemerintah sebagai regulator

yaitu peran pemerintah dalam menerbitkan peraturan atau regulasi dalam rangka tertib administrasi pembangunan dalam rangka pengembangan potensi wisata.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA) bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata serta Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros sepakat untuk menyelenggarakan percepatan

pengembangan pariwisata alam di kawasan hutan konservasi yang difokuskan di 5 (lima) kawasan taman nasional, satu diantaranya adalah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Mengemban amanat tersebut, maka perlu disusun perangkat perencanaan pengembangan wisata pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang sinergis dan terintegrasi dalam pembangunan regional dan nasional. Suatu perencanaan yang diarahkan pada upaya pendayagunaan potensi objek wisata alam dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian alam. Namun pengelolaan objek wisata alam Bantimurung belum sesuai dengan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan oleh informan RB selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sebagai berikut:

“Pengelolaan pariwisata alam pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung belum dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kawasan wisata Bantimurung yang merupakan primadona wisata di Propinsi Sulawesi Selatan pada saat ini masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros, begitupun Objek wisata budaya Taman Prasejarah Leangleang. Hal yang sama terjadi di kawasan wisata Leang Lomong yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Padahal ketiga Objek wisata tersebut termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung.” (Hasil wawancara RB, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan penjelasan informan RB di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata Leang Lonrong masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep, padahal objek wisata tersebut seharusnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros, karena objek wisata alam Leang-leang dan Leang Lonrong masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Kihin (2013) bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan, Disinilah diperlukan konsistensi peran pemerintah sebagai regulator yang seharusnya dapat menerbitkan Undang-Undang tentang batasan wilayah objek wisata alam yang bisa dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros.

2. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata.

a. Tersedianya Atraksi Wisata Yang Menarik

Adanya atraksi wisata yang menarik merupakan faktor utama dalam pengembangan pariwisata. Akan tetapi pengembangan tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung suatu daerah tujuan Wisata. Potensi objek dan daya tarik wisata Kabupaten Maros terdiri dari atraksi alam, atraksi budaya dan atraksi kesenian. Potensi atraksi wisata tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Atraksi Alam

a) Taman Wisata Alam Bantimurung

Taman Wisata Alam Bantimurung terletak di lembah bukit kapur/karts yang curam denganiyegetasi tropis yang subur sehingga selain memiliki air terjun yang spektakuler juga menjadi habitat yang ideal bagi berbagai species kupu-kupu, burung dan serangga yang langka dan endemik. Di kawasan ini juga terdapat beberapa Gua salah-satunya yaitu Gua Mimpi dengan panjang lorong 1.500 m dan memiliki ornamen-ornamen yang menakjubkan.

b) Taman Wisata Alam Gua Pattunuang

Kawasan ini memiliki kurang lebih 40 gua. Gua-gua tersebut masih alami dan belum mengalami perubahan-perubahan oleh aktivitas manusia. Selain kaya akan ornamen-ornamen gua yang indah juga disekitar gua memiliki panorama alam yang sangat indah dan menawan, sungai yang diapit tebing terjal merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Umumnya gua yang ada didalam kawasan ini dapat dijangkau dengan mudah, gua-gua tersebut mempunyai panjang lorong rata-rata 1.000 meter dengan kedalaman“30 meter. Didalam kawasan ini juga terdapat sebuah” batu besar berbentuk perahu yang dinamakan “Bisean g Labboro” menyimpan legenda yang menarik. Balai Taman Nasional BantimurungBulusaraung sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan kawasan ini, telah membangun beberapa fasilitas antara lain: Fasilitas Camping Ground, Shelter, Jalan Trail Wisata, Toilet dan Pos Pelayanan Tiket.

c) Cagar Alam Karaenta.

Cagar Alam Karaenta merupakan kawasan hutan yang sangat dilindungi, karena selain berfungsi untuk mempertahankan cadangan air bawah tanah, juga menjadi habitat berbagai species flora-fauna langka dan endemik sebagai sumber daya hayati yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan. Salah satu daya tarik kawasan ini adalah keberadaan Gua Salukang Kallang yang memiliki panjang sekitar 15 Km dan diperkirakan merupakan gua terpanjang di Indonesia.

Kawasan ini sering dikunjungi oleh para penelusur gua dan peneliti-peneliti dari Manca Negara.

2) Atraksi Budaya

Perjalanan sejarah Kabupaten Maros yang panjang mulai jaman prasejarah, jaman kerajaan kuno hingga jaman kolonial beserta peninggalan-peninggalannya dan kondisi geografis Kabupaten Maros yang mempunyai wilayah kawasan pantai dan darat serta keberadaan suku, bangsa dan agama menambah kekayaan serta memberikan pengaruh yang besar terhadap kebudayaan masyarakat setempat sehingga melahirkan bentuk-bentuk kebudayaan berupa tari-tarian dan ritual-ritual yang sarat dengan nuansa agraris dan bahari yang turut menambah daya tarik wisata khususnya wisata budaya. Objek dan daya tarik wisata budaya di Kabupaten Maros antara lain

a) Taman Prasejarah Leang-Leang

Taman prasejarah leang-leang terletak pada deretan bukit kapur/karts yang curam. Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa gua yang terdapat dikawasan

tersebut pernah dihuni manusia sekitar 3.000-8.000 tahun sebelum masehi; Hal ini dapat terlihat dari lukisan prasejarah berupa gambar babi rusa dan puluhan gambar telapak tangan yang ada pada dinding-dinding gua. Selain gua prasejarah, disini juga . didapatkan benda-benda peninggalan yang lain berupa alat-alat perkakas dari batu dan sisa-sisa makanan manusia masa lampau. Ketika ditanyakan tentang keindahan Taman Prasejarah Leang-Leang, informan FA selaku pengunjung objek wisata Bantimurung, berikut tanggapannya:

“Yang mengherankan mengapa masyarakat atau pengunjung kurang yang datang ke tempat ini, Padahal sebelum Taman Nasional Bantimurung ini ada satu destinasi wisata yang cukup menarik lho, yaitu Leang Leang. Leang Leang ini letaknya sebelum Taman Nasional Bantimurung. Untuk masuk ke kawasan ini memang berjarak beberapa kilometer dari jalan utama. Namun sekarang jalannya sudah aspal. Berbeda 4 atau 5 yang tahun lalu, jalan untuk masuk ke lokasi masih cukup rusak dan sempit. Sekarang akses ke sini sudah cukup bagus dan infrastrukturnya pun juga sudah tertata baik.”(Hasil wawancara FA, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan FA dapat disimpulkan bahwa selain objek wisata Bantimurung yang dapat ditemui di Kabupaten Maros, Taman Prasejarah Leang-Leang juga merupakan tempat wisata yang sangat indah. untuk dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun asing.

b) Situs Prasejarah Rammang-Rammang

Situs prasejarah rammang-rammang merupakan rangkaian dari perjalanan sungai pute, ditempat ini terdapat sekitar tiga situs gua prasejarah yang masing-masing memiliki peninggalan yang berbeda. Dibandingkan dengan peninggalan lukisan gua yang ditemukan di leang-leang yang menggambarkan aktivitas kehidupan berburu di daerah dataran rendah yang ditandai dengan adanya lukisan babi rusa , situs gua prasejarah yang ada di rammang-rammang

memiliki peninggalan lukisan gua yang menggambarkan aktivitas berburu pada daerah pesisir dan laut karena ditempat ini ditemukan. lukisan gua berupa lukisan perahu, manusia yang membawa tombak dan mengendarai perahu, gambar kura-kura dan gambar ikan. Perpaduan bentang alam yang memikat dan peninggalan gua prasejarah semakin menambah daya tarik wisata kawasan ini

c) Bulu Sipong

Bulu Sipong merupakan nama bukit karts yang berdiri sendiri dan berada ditengah hamparan sawah yang luas. Dikawasan Bulu Sipong terdapat beberapa gua

yang memiliki tinggalan budaya berupa gambar cap tangan, gambar babi rusa, gambar perahu dan ikan.

Terkait pengembangan potensi-potensi pariwisata khususnya atraksi budaya yang diuraikan sebelumnya, informan RB selaku Kepala Dinas Pariwisata memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Pengembangan potensi pariwisata yang kami lakukan bukan hanya pada objek wisata alam Bantimurung, Namun kawasan hutan batu Rammangw Rammang di Desa Salenrang juga akan dikembangkan menjadi objek wisata alam yang cukup menjanjikan. Pengembangan proyek wisata alam ini dikerjakan pada Tahun 2012 yang diawali dengan penelitian terlebih dahulu guna mengubah wajah Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Untuk penelitian, kami mengadakan kerjasama dengan konsultan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).”(Hasil wawancara RB,. tanggal 18 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RB di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan. potensi pariwisata yang dilakukan pemerintah, bukan. hanya pada objek wisata alam Bantimurung, tapi juga kawasan hutan Rammang-Rammang yang juga merupakan objek wisata yang cukup menjanjikan

mendatangkan pengunjung yang lebih banyak lagi. Pengembangan potensi pariwisata Bantimurung, Leang-Leang dan Rammang-Rammang merupakan proyek terpadu, seperti yang dijelaskan oleh informan RD selaku Satpol PP Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yang bertugas pada objek wisata'alam Bantimurung sebagai berikut:

“Salah satu Pengembangan kawasan wisata Bantimurung yaitu proyek terpadu yang menghubungkan hutan batu Rammang-Rammang dan Taman Purbakala Leang-Leang melalui jalan darat atau pun menelusuri alur sungai. Keindahan objek wisata Bantimurung semakin memikat dengan adanya paket terpadu, dimana pengunjung dapat melintasi hutan Ramang-Ramang dan Taman Purbakala Leang-Leang _ serta kawasan karts Bantimurungv Bulusaraung.”(Hasil wawancara RD, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RD, dapat disimpulkan bahwa keindahan objek wisata alam Bantimurung akan semakin memikat dengan adanya paket terpadu, yang memberikan kesempatan pada pengunjung menikmati keindahan dengan melintasi hutan Rammang-Rammang, Taman Leang-Leang dan kawasan Bantimurung.

3) Atraksi Kesenian Dan Ritual Masyarakat

Karakteristik sosial budaya masyarakat di daerah Kabupaten Maros seperti halnya masyarakat Sulawesi Selatan lainnya umumnya termasuk klasifikasi masyarakat homo gen ditandai dengan ciri dan karakter masyarakat yang berkembang pada umumnya memiliki ciri yang sama. Khusus daerah Kabupaten Maros didasarkan pada potensi wilayah yaitu sub sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, dengan demikian karakter spesifik masyarakatnya adalah sebagian masyarakat agraris dan masyarakat nelayan. Ditinjau daripola kebiasaan yang berkembang saat ini pola perilaku masyarakat yang masih dominan

adalah sifat kegotong royongan terutama pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan secara bersama-sama. Salah satu karakter budaya yang masih menonjol di daerah Kabupaten Maros adalah upacara adat pasca panen, tari-tarian tradisional serta ritual-ritual lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok adat. Bentuk-bentuk kesenian

dan tradisi yang berkembang dan dapat menjadi daya tarik wisata antara lain : a). *Tari-Tarian Tradisional* Tari-tarian tradisional yang ada di Kabupaten Maros yaitu Tari Makkampiri, Tari Pakkuru Sumange, Tari Kalabng, Tari Mappede pepe, Tari Pattennung. dan Tari Kalubampa. b). *Upacara Adat*. Upacara adat yang biasa dilakukan di Kabupaten Maros antara lain: Appalili. Upacara ini adalah suatu rangkaian upacara adat sebelum memasuki masa tanam bibit padi. Para petani sebelum turun ke sawah mengambil alat-alat kerajaan yang sebelumnya di taruh dalam sebuah loteng rumah adat yang disebut Balla Lompoa ketempat khusus yang tersedia. Terkait hal tersebut informan MS selaku masyarakat memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Upacara adat atau ritual adat yang menjadi daya tarik wisatawan dan masih sering dilakukan masyarakat di Kabupaten Maros ini yaitu Appalili dan Kattoboko yang merupakan ritual yang dilaksanakan sebagai refleksi rasa syukur setelah berhasilnya panen padi. Pada saat itu masyarakat petani bersatu pergi kesawah Kerajaan Arrajang Marusu, untuk mengetam padi kemudian diikat pada alat khusus yang tersedia, sesudah itu diantar ke Balla Lompoa (Rumah Raja). Hasil panen lalu disambut secara adat oleh pemerintah, pemangku adat, dewan adat, penasehat adat dan petani.”(Hasil wawancara tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MS di atas maka dapat disimpulkan upacara adat atau ritual adat juga perlu dilestarikan karena dapat

menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam Bantimurung, karena masyarakat sekitar objek wisata masih sering melaksanakan ritual adat tersebut. Hal senada juga diungkapkan informan RS selaku Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan sebagai berikut:

"Kami sangat mengharapkan, wisatawan atau pengunjung bisa tinggal lebih lama di Bantimurung sambil bermain golf atau mengikuti wisata petualangan yang akan dikemas cukup menarik dalam satu paket wisata terpadu. Setelah berbagai fasilitas tersebut rampung dan lengkap dalam kawasan wisata alam itu, maka wisatawan tentunya akan lebih tertarik sambil menyaksikan atraksi alam, atraksi seni dan atraksi budaya tradisional Kabupaten Maros." (Hasil wawancara RS, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RS, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sangat berharap bahwa wisatawan atau pengunjung bisa menghabiskan waktu liburan

mereka untuk waktu yang cukup lama di objek wisata Bantimurung dengan disediakan berbagai macam fasilitas pariwisata yang lengkap serta sajian atraksi alam, atraksi budaya, maupun atraksi seni Kabupaten Maros.

b. Tersedianya Sarana Prasarana dan Akomodasi

Sarana dan prasarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi,

restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, sedangkan secara kualitatif ialah menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

Objek Wisata alam Bantimurung berada sekitar 20 kilometer dari Bandara Hasanuddin atau 50 kilometer dari Kota Makassar ke arah utara. Perjalanan dengan mobil pribadi dari pusat kota Makassar akan menggunakan waktu kurang lebih 1 jam. Pilihan terbaik adalah melalui jalan tol Reformasi ke arah gerbang tol Biringkanaya, Mandai lalu lanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, wisatawan akan sampai di lokasi wisata alam Bantimurung dalam 10 menit. Terkait hal tersebut, informan MS selaku masyarakat Kabupaten Maros memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Mengenai transportasi umum menuju objek 'wisata Bantimurung sudah banyak tersedia. Pilihan paling populer adalah mobil angkutan umum atau yang biasa disebut pete-pete oleh masyarakat lokal. Dari Maros kota, Pengunjung sudah bisa mencapai Bantimurung dalam 15 menit menggunakan pete-pete jurusan Bantimurung. Bila pengunjung atau wisatawan berangkat bersama rombongan, maka pilihan terbaik adalah menggunakan mobil yang disewa harian. Mereka juga bisa menggunakan taksi langsung dari Makassar dengan tarif minimal Rp 140.000.”(Hasil wawancara MS, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MS, dapat disimpulkan bahwa sarana transportasi menuju lokasi objek Wisata alam Bantimurung bukan lagi hal yang sulit bagi pengunjung. Dengan biaya terjangkau dan waktu yang tidak terlalu lama pengunjung telah dapat memasuki lokasi objek wisata. ” 2.1.. Selain sarana transportasi dan akomodasi, infrastruktur seperti akses menuju

lokasi objek wisata juga merupakan hubungan dengan sarana transportasi, informan MA selaku pengunjung yang sering berlibur ke Objek wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros mengatakan :

“Saya sangat mengagumi keindahan“ tempat wisata Bantimurung, makanya ketika ada hari libur kerja, saya pasti menyempatkan diri untuk mengunjungi Bantimurung bersama teman-teman dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekarang Kondisi jalan menuju Bantimurung sudah mulai baik dan lancar dibandingkan setahun yang lalu, jalanan masih rusak dan lubang-lubang, hingga membuat perjalanan kami menjadi lamban dan tersendat-sendat.”(Hasil wawancara MA, tanggal 20 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MA di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sarana infrastruktur seperti jalan menuju tempat Objek wisata alam Bantimurung juga sangat mempengaruhi ketertarikan pengunjung untuk datang. Pengunjung akan merasa nyaman menuju lokasi wisata dengan kondisi jalan yang bagus dan lancar. Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan, agar selalu memperhatikan sarana maupun prasarana serta fasilitas-fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Maros khususnya Objek wisata alam Bantimurung. Ketika ditanyakan mengenai kondisi infrastruktur, informan AG Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Maros menyatakan bahwa:

“Kondisi jalan menuju objek wisata alam Bantimurung Sebagian bagus dan sebagian masih dalam pembenahan tetapi pada umumnya kondisinya cukup baik. Misalnya untuk kondisi jalan yang menuju ke objek wisata alam Bantimurung masih perlu diperbaiki. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kondisi jalan melalui Dinas Jasa Marga agar jalur transportasi berjalan lancar dan mempermudah wisatawan untuk melakukan perjalanan. Meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke objek wisata alam Bantimurung tahun ini tidak terlepas dari bantuan pemerintah provinsi atas perbaikan jalan poros Kabupaten Maros. Kondisi jalan yang baik sangat berdampak terhadap tingginya intensitas pengunjung Bantimurung.” (Hasil wawancara AG, Tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AG di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kondisi jalan menuju objek wisata alam Bantimurung masih perlu diperbaiki, untuk itu perlu adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dinas Jasa Marga untuk memperbaiki jalan tersebut. Dalam hal perbaikan jalan, bukan hanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Jasa Marga saja akan tetapi juga dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta pihak-pihak swasta lainnya. Sehubungan dengan hal ini, informan TA selaku Kepala seksi sarana dan prasarana pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Maros mengatakan:

“Penyediaan sarana dan prasarana Wisata yang ada di objek wisata alam Bantimurung sebenarnya bukan hanya. beban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Fasilitas-fasilitas ini, juga harus dikerjakan oleh sejumlah dinas-dinas lainnya di Kabupaten Maros. Salah satunya adalah sarana jalanan yang memadai. Awal tahun ini, pengunj uug mengalami penurunan karena kondisi jalan dari poros Kabupaten Maros mengalami kerusakan. Pertengahan tahun," jalan itu akhirnya membaik dan wisatawan kembali berdatangan. Kondisi Ini juga perlu dibenahi bersama-sama dengan dinas lain seperti dinas pekerjaan umum (PU).” (Hasil wawancara TA, Tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan. hasil wawancara dengan informan TA di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DinasDinas terkait, sangat diperlukan dalam rangka perbaikan Sarana serta fasilitas-fasilitas yang menunjang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Maros khususnya objek wisata alam Bantimurung. Selain perencanaan terkait pengembangan potensi pariwisata dari segi penyediaan fasilitas/sarana dan juga infrastruktur jalan, perencanaan juga difokuskan pada pembangunan hotel atau penginapan, seperti yang dijelaskan oleh informan RB selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sebagai berikut:

“Selain pembangunan hotel berlantai tiga, Wisma Bantimurung yang lokasinya di sekitar lapangan tenis, juga akan dibongkar. Wisma tersebut akan Kami rubuhkan. Di lokasi bekas wisma tersebut akan dibangun hotel dua lantai. Rencananya pembangunan secara keseluruhan itu memakan anggaran senilai Rp10 miliar. Anggaran Rp10 miliar itu tidak hanya untuk pembangunan hotel, tapi juga untuk pembangunan restoran, waterboom, perbaikan sarana infrastruktur jalan ke gua mimpi. Kami berharap, kelak setelah hotel dan sarana pendukung lainnya beroperasi, Objek wisata alam Bantimurung akan menjadi penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.”(Hasil wawancara, RB, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RB di atas, dapat disimpulkan bahwa selain merencanakan pembangunan hotel berlantai tiga, Pemerintah juga berencana merenovasi Wisma Bantimurung menjadi sebuah hotel berlantai dua, pembangunan restoran, waterboom, dan perbaikan sarana infrastruktur jalan menuju Gua Mimpi.

c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dalam upaya pengembangan pariwisata daerah. Sumber daya manusia ini harus memiliki keahlian dan ketrampilan yang diberikan untuk memberikan pelayanan pariwisata serta menangani berbagai permasalahan kepariwisataan daerah dan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Seperti yang di katakan oleh informan RS selaku Kepala seksi pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan:

“Terkait masalah rekrutmen itu kita ikut pada regulasi secara nasional, rekrutmen PNS (Pegawai Negeri Sipil), tapi mengenai penempatan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu berdasarkan tolak ukur dan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti jurusan bahasa itu banyak yang kita butuhkan. Memang saat ini jumlah pegawai kita dalam bidang kepariwisataan dan bahasa itu masih kurang, tapi kedepannya kita

berusaha untuk mengisi kekurangan itu dengan pegawai yang berkompeten dalam bidang pariwisata”.(Hasil wawancara RS,Tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maros masih kurang yang mempunyai keahlian dibidang pariwisata dan bahasa asing, untuk itu pemerintah akan berusaha untuk mengisi kekurangan tersebut dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pariwisata.

Selain itu, kebijakan PemErintah Daerah untuk menempatkan tenaga lokal pendukung di bidang kepariwisataan pada industri pariwisata di Kabupaten Maros belum ditunjang oleh kesiapan keterampilan dan keahlian, seperti penguasaan bahasabahasa asing serta ketrampilan tentang bidang kepariwisataan lainnya yang belum profesional. Untuk itulah diperlukan adanya suatu upaya untuk lebih meningkatkan lagi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, terutama untuk aparat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros, sehingga upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah bisa terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.

Hasil wawancara dari beberapa informan dan berdasarkan observasi peneliti di atas menunjukkan bahwa dalam upaya pengembangan potensi wisata alam Bantimurung, Pemerintah Kabupaten Maros telah menyediakan sarana prasarana, fasilitas maupun infrastruktur yang memadai guna melestarikan dan menjaga atraksi wisata, atraksi seni dan atraksi budaya khas Kabupaten Maros, Hal ini sejalan dengan

teori yang dijelaskan Kihin (2013) bahwa Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata.

3. Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Pemerintah sebagai motivator adalah peran pemerintah dalam menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, selain itu menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan juga banyak memberikan-bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan selain itu memelihara, mengembangkan-. dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan potensi-potensi pariwisata

a) Menyediakan Informasi Kepariwisata dan Pemasaran

Terkait dengan pemasarannya, citra pariwisata menjadi sangat penting. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jati diri dan citra yang menjadi tema utama pemasaran objek wisata alam Bantimurung. Pemasaran dan promosi pariwisata di daerah, pihak industri pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) bertanggungjawab atas upaya promosi paket wisata serta pelayanan pariwisata yang ditawarkan. Untuk mengembangkan segmen pasar wisatawan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros sudah melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif untuk mempromosikan objek wisata alam Bantimurung baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dinas Pariwisata Kabupaten Maros telah melakukan promosi melalui media cetak, yang memuat tentang keindahan objek wisata alam Bantimurung dengan tujuan akan memberikan daya tarik kepada wisatawan baik yang berasal dari luar negeri maupun wisatawan lokal. Bahwa promosi wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maros masih berkisar dalam negeri (Kota, Kabupaten, dan Provinsi) saja. Walaupun pihak dinas pariwisata telah memiliki website tentang objek wisata alam Bantimurung, namun hasil yang didapatkan sangat minim, hal ini terlihat dari jumlah wisatawan asing yang datang ke Kabupaten Maros masih sangat sedikit. Untuk mengembangkan segmen pasar wisatawan Kabupaten Maros, Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sudah melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif untuk mempromosikan wisata alam Kabupaten Maros di luar. terkait hal tersebut informan RM selaku Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Maros mengatakan:

“Selain di kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata itu sendiri, kami juga mempromosikan keindahan wisata alam Bantimurung ini di media cetak maupun media elektronik. Kami juga terus mengup-date Website kami yang berhubungan dengan objek wisata Kabupaten Maros agar lebih memudahkan bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Untuk wisatawan lokal, kami mulai mempromosikannya melalui radio-radio lokal dan Koran lokal yang ada.””(Hasil wawancara RM, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dalam mempromosikan objek wisata alam Bantimurung adalah melalui media cetak maupun media elektronik.

b) Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari produk kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. penyiapan sumber daya manusia tidak hanya bagi aparat pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan dampaknya) bagi masyarakat awam. Seperti yang dikatakan oleh informan AR selaku masyarakat yang juga salah seorang pemilik art shop di objek wisata alam Bantimurung berikut ini :

”Pengelolaan pariwisata oleh pemerintah khususnya di objek wisata alam Bantimurung ini) sudah baik namun kami berharap ditingkatkan lagi. Sejak pembangunan art shop sayasekitar dua tahun yang lalu, izin saya tidak dipersulit oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada kami untuk mengembangkan usaha kami Secara khusus untuk kelompok penjualan souvenir kupu-kupu yang ada di lokasi wisata alam Bantimurung ini. Bantuan ini diberikan pada kelompok yang berjumlah 10-15 orang tiap kelompok. Selain itu ada juga bantuan dari program PNPM untuk pariwisata yang sudah berjalan selama 2 tahun.””(Hasil wawancara AR, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AR, di atas maka dapat dianalisis bahwa Salah satu kebijakan yang sudah mulai dijalankan Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros di bidang pengembangan SDM ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan di daerahnya dengan bantuan untuk kelompok-kelompok usaha kecil di objek wisata tertentu. Pemerintah juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya Sumber Daya Manusia yang berhadapan langsung dengan wisatawan. Sehubungan dengan hal tersebut, informan MR selaku

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“Karena objek wisata alam Bantimurung memang kebanyakan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan sebagian besar pula menggunakan bahasa Inggris, kami memberikan penyuluhan singkat kepada masyarakat sekitar objek wisata agar mau mempelajari bahasa Inggris agar nantinya bisa berkomunikasi juga dengan wisatawan Inancanegara.”(Hasil wawancara MR, tanggal 18 Desember 2014)

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa masyarakat sekitar objek wisata Bantimurung juga harus diberikan penyuluhan singkat agar mau belajar bahasa Inggris sehingga nantinya memudahkan berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara.

c) Pengembangan Penangkaran Kupu-kupu

Di lokasi tersebut terdapat sedikitnya, 150 spesies kupu-kupu yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Bantimurung dikenal sebagai surganya kupu-kupu karena semua spesiesnya kupu-kupu ada di wilayah itu. Untuk berbagai jenis kupukupu bisa dilihat di museum kupu-kupu Bantimurung. Sedikitnya ada 20 jenis kupukupu yang dilindungi pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah . Nomor 7 Tahun 1999. di lokasi tersebut terdapat sedikitnya, 150 spesies kupu-kupu yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Bantimurung dikenal sebagai surganya kupu-kupu karena semua spesiesnya kupu-kupu ada di wilayah itu. blamun Ragam kupu-kupu pun terus menyusut. Dari 107 jenis hasil penelitian tahun 1990ean, kini tinggal 89 jenis kupu-kupu. Pengembangan tempat wisata alam seluas 18 hektar itu pun mengundang animo masyarakat. Terkait penyebab menyusutnya jenis kupu- kupu, Berikut tanggapan dari informan MS selaku masyarakat di objek Wisata alam Bantimurung:

“Kunjungan wisatawan yang terus meningkat turut membatasi ruang gerak kupu-kupu. Kondisi ini mengganggu kenyamanan kupu-kupu yang senang dengan kelembaban di pinggir sungai, demikian pula Pohon jeruk, sirih hutan, dan srikaya, serta tanaman bunga sepatu dan bunga asoka berganti dengan bangunan beton untuk fasilitas rekreasi. Kondisi itu memicu penyusutan ragam kupu-kupu di Bantimurung sehingga banyak kupu-kupu yang bermigrasi ke tempat lain mencari tempat untuk bertelur.”(Hasil wawancara MS ,tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MS di atas maka dapat disimpulkan bahwa wisata keragaman jenis kupu-kupu mulai menyusut disebabkan oleh banyaknya kunjungan wisatawan dan pembangunan fasilitas rekreasi membatasi ruang gerak kupu-kupu sehingga kupu-kupu tersebut bermigrasi ke tempat yang lebih nyaman dan lembab.

Guna mencegah kondisi yang kian memprihatinkan tersebut, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menggalakkan penanaman pohon dan tanaman bunga yang menjadi tempat bertelur kupu-kupu. ratusan pohon jeruk, srikaya, dan sirih hutan telah ditanam di sekitar Danau Kasikebo yang terdapat di dalam tempat wisata alam Bantimurung. Sementara areal pinggiran sungai. dan daerah sekitar museum banyak ditanami tanaman kembang sepatu dan bunga asoka. Pemulihan habitat menjadi faktor terpenting untuk menjaga kelestarian kupu-kupu.

Berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam pengembangan potensi pariwisata alam Bantimurung, Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan upaya-upaya diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan dan pemasaran, memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan kepada Sumber Daya Manusia yang

terjun langsung dalam pengelolaan wisata alam Bantimurung serta pengembangan penangkaran kupu-kupu yang merupakan aset nasional dari Kabupaten Maros.

Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Kihin (2013) bahwa peran Pemerintah sebagai motivator adalah peran pemerintah dalam menyediakan informasi ' kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, selain itu menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan juga banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan selain itu memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan potensi-potensi pariwisata

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Alam Bantimurung

1. Faktor Pendukung

a) Tersedianya Fasilitas Penunjang Wisata

Mengembangkan pariwisata tidak cukup sekedar membangun Objek wisata, pariwisata juga terkait dengan ketersediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, perbankan, bandara, terminal, dan travel agent. Diharapkan dengan perencanaan yang sinergi dengan seluruh elemen pariwisata, membuat para wisatawan merasa betah dan berminat mengulang kunjungannya.

Tersedianya fasilitas pendukung pariwisata yang ada merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembang dan berjalan lancarnya sektor pariwisata daerah. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan informan TA selaku Kepala

Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, menyatakan bahwa:

“Pada umumnya sarana dan prasarana pariwisata seperti penginapan, rumah makan/restoran, travel dan perbankan di kabupaten maros cukup lengkap, hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata, namun semuanya ada di pusat kota Maros, namun sarana yang tersedia di lokasi wisata alam Bantimurung dan Leang-leang hanya ada penginapan, terkadang juga ada masyarakat lokal yang menyewakan rumahnya untuk dijadikan penginapan ”. (Wawancara Tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TA, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pemmjang pariwisata dalam hal. ini hotel, restoran/rumah makan, dan travel dapat dikatakan sudah lengkap dan semuanya tersedia di pusat kota. Sementara itu penginapan hanya tersedia di objek wisata Bantimurung dan Leangdeang sedangkan objek wisata lain belum memiliki penginapan tetap tetapi jika pengunjung ingin menginap ada beberapa warga sekitar yang menyediakan beberapa kamar di rumahnya untuk disewakan kepada para pengunjung.

b) Kesadaran masyarakat

Masyarakat menyadari bahwa objek wisata alam Bantimurung sebagai salah satu tujuan wisata yang terkenal di Sulawesi Selatan, sehingga mereka turut serta mengambil bagian seperti menjaga kebersihan di objek wisata sekitar tempat tinggal mereka, seperti dalam wawancara dengan informan MS selaku masyarakat sekitar objek wisata Bantimurung berikut :

“Kami bangga karena objek wisata alam Bantimurung ini sudah dikenal banyak orang sehingga kami sebagai masyarakat yang tinggal sekitar objek wisata ini berusaha menjaga kelestarian dan kebersihan objek wisata agar wisatawan tidak terganggu dengan pemandangan yang kotor. Kami berupaya melengkapi sarana kebersihan. Sekali seminggu kami juga mengadakan kerja bakti di dalam objek wisata ini.”(Hasil wawancara MS, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MS di atas maka dapat dianalisis bahwa salah satu pendukung dari pengembangan wisata alam Bantimurung adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lokasi wisata alam yang akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Hal senada dikatakan oleh informan RS selaku Kepala seksi pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros bahwa pengelolaan pariwisata Kabupaten Maros tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pengelola objek wisata itu sendiri karena untuk mencapai peningkatan kualitas kepariwisataan ini dibutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif antara pemerintah, masyarakat dan pengelola objek wisata. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kami sangat kagum dengan masyarakat dan pengelola objek wisata di beberapa objek wisata yang ada di kabupaten Maros, khususnya di objek wisata alam Bantimurung ini, banyak dikunjungi wisatawan karena kebersihan lokasi wisata. Masyarakat dengan kesadaran sendiri mau membantu untuk menjaga kebersihan di sekitar objek wisata tanpa ada perintah langsung dari pihak tertentu. Begitu pula dengan pengelola objek wisata yang tanpa menunggu bantuan atau penyediaan fasilitas dari pemerintah, berusaha melengkapi sarana kebersihan di objek wisata itu.”(Hasil wawancara RS, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RS di atas maka dapat dipahami bahwa partisipasi aktif dari masyarakat, pengelola objek wisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata di Kabupaten Maros khususnya pada objek wisata alam Bantimurung memang sudah seharusnya dilakukan, mengingat objek wisata yang ada di Kabupaten Maros ada banyak dan semuanya belum tentu bisa dikelola hanya satu pihak seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pihak yang memang bertanggung jawab

dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Maros ini. Hal yang paling kecil yang bisa membantu pemerintah adalah dengan menjaga kebersihan di objek wisata tersebut agar wisatawan menjadi nyaman dan aman menikmati keindahan objek wisata alam Bantimurung.

c) Banyaknya Potensi Pariwisata Yang Terdapat di Kabupaten Maros

Banyaknya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Maros seperti Pattunuang, Bulusaraung, gua-gua alam, gua-gua prasejarah, terjalnya tebing karst, atraksi satwa Macaca mama di Karaenta, dan atraksi kupu-kupu yang merupakan flagship kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung serta sejumlah Objek dan daya tarik wisata lainnya. Potensi pariwisata objek wisata alam Bantimurung ini juga sangat mendukung karena mendatangkan wisatawan yang banyak ke Kabupaten Maros, “seperti yang dikatakan informan HA selaku Seksi Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dalam wawancara berikut :

“Kita patut bangga dengan daerah Kabupaten Maros ini yang menyediakan begitu banyak potensi-potensi wisata yang menarik.... Potensi wisata yang banyak ini secara tidak langsung sangat mendukung dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Maros dan dari potensi wisata yang banyak ini tentunya menghasilkan juga berbagai produk wisata khususnya produk wisata andalan yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Kabupaten Maros.”(Hasil wawancara HA, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HA di atas maka dapat dianalisis bahwa salah satu faktor pendukung dari pengembangan wisata di Kabupaten Maros adalah banyaknya potensi wisata yang menarik serta produk wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

2. Faktor Penghambat

a) Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan objek wisata alam Bantimurung khususnya, Sehubungan dengan hal tersebut di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan MR selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“Pengembangan wisata menyangkut berbagai instansi yang terkait baik swasta maupun pemerintah. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi dari semua pihak yang berkepentingan. Kurangnya koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab mengelola seringkali mengakibatkan perkembangan wisata tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Beberapa Objek wisata masih dikelola oleh pihak. Pemerintah Daerah. Perlu ada solusi jalan tengah penertiban pengelolaan wisata, khususnya objek wisata Bantimurung.” (Hasil wawancara MR, tanggal 18 Desember 2014)

Hasil wawancara dengan informan MR di atas menunjukkan bahwa dalam pengembangan potensi pariwisata sangat diperlukan koordinasi dari berbagai instansi yang terkait baik swasta maupun pemerintah untuk mengelola pariwisata di Kabupaten Maros.

b) Kurangnya SDM yang berkualitas

Sukses atau tidaknya pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Maros juga tergantung pada kemampuan para pelaksana yang bertugas pada tempat-tempat daerah tujuan wisata maupun aparat pelaksana pengembangan sektor pariwisata, yakni aparat Dinas Pariwisata yang memiliki kewenangan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata.

Ironisnya, dalam upaya untuk mengembangkan sektor" pariwisata di Kabupaten Maros, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak didukung oleh tersedianya aparatur di bidang kepariwisataan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini bisa kita lihat pada minimnya jumlah pesonil yang mempunyai latar belakang pendidikan pariwisata. Hal tersebut diperjelas oleh informan TA selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwa tingkat pendidikan aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros masih kurang memadai. dimana dari 78 orang pegawai hanya ada 5 orang pegawai yang berlatar belakang pendidikan pariwisata, 2 orang berlatar belakang pendidikan arkeologi, dan 4 orang berlatar belakang pendidikan bahasa. Padahal yang banyak dibutuhkan saat ini adalah tenaga guide wisata khusus yang memahami kondisi objek wisata. Hal ini tentunya masih kurang dari kebutuhan dunia pariwisata Kabupaten Maros yang semakin berkembang/(ham wawancara TA, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TA, maka dapat disimpulkan bahwa minimnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maros mempengaruhi perkembangan dunia pariwisata.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan (Objek wisata Bantimurung), penguasaan bahasa asing beberapa pegawai di Objek wisata tersebut masih sangat kurang dan cenderung pasif ketika berkomunikasi dengan wisatawan asing. Yang lebih menonjol adalah anak-anak muda pedagang souvenir yang pada umumnya bisa berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jepang. terkait dengan hal

tersebut, informan RD selaku Satpol PP Dinas Pariwisata yang bertugas pada objek wisata Bantimurung mengatakan bahwa :

“Pegawai yang bisa berbahasa asing di objek wisata Bantimurung hanya sedikit sehingga jika ada kunjungan wisatawan asing dalam jumlah besar dan datangnya tidak bersamaan mereka menjadi kewalahan. Jika dibandingkan antara pegawai di sini dengan anak-anak pedagang souvenir lebih banyak anak-anak pedagang souvenir yang bisa berbahasa asing ketimbang para pegawai, pada hal anak-anak tersebut hanya belajar bahasa asing secara autodidak tanpa menempuh peajaran secara formal”. (Hasil wawancara RD, Tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RD di atas dapat diketahui bahwa kualitas dan kuantitas pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih jauh dari kebutuhan dunia kepariwisataan daerah hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata dan kebudayaan masih sangat sedikit dan kemampuan untuk berbahasa asing yang masih kurang.

c) Keterbatasan Dana

Sebagai daerah yang memiliki banyak potensi wisata, Kabupaten Maros membutuhkan dana yang besar untuk pengembangan pariwisatanya, namun kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana seperti dikatakan oleh informan HN selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Maros sebagai berikut:

“Delapan puluh persen anggaran yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros digunakan untuk pembangunan fisik atau untuk membangun objek wisata, padahal sangat dibutuhkan anggaran lebih lebih besar untuk pelestarian kebudayaan, pengembangan potensi pariwisata yang ada, penyediaan sarana dan prasarana wisata, serta perbaikan infrastruktur akses menuju lokasi wisata alam Bantimurung.”(Hasil wawancara HN, tanggal 18 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HN di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan dana yang diberikan kepada Dinas Pariwisata

merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Maros. Faktor dana dalam pengelolaan objek wisata karena objek wisata alam perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang merupakan penunjang minat wisata para pengunjung. Apabila Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros hanya mengandalkan APBD dalam pengelolaan objek wisata alam Bantimurung ini maka tentunya akan sulit terpenuhi, sedangkan objek wisata alam ini membutuhkan banyak anggaran. Untuk itu perlu adanya kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta maupun investor lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab-Bab sebelumnya mengenai peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros:
 - a. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam Pengembangan objek wisata alam Bantimurung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maros belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan Pengelolaan wisata alam pada Taman Nasional Bantimurung belum terkelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung dapat dikatakan efektif karena pemerintah sebagai fasilitator mampu menyediakan sarana dan prasarana, akomodasi, fasilitas penunjang wisata, serta infrastruktur berupa akses jalan menuju lokasi objek wisata yang sudah ..baik, SDM yang berkualitas yang memiliki wawasan kepariwisataan yang cukup baik.
 - c. Peran pemerintah sebagai motivator dapat dikatakan efektif karena Pemerintah mampu menyediakan informasi tentang objek wisata alam

Bantimurung dan pemasarannya melalui media cetak, media elektronik (TV lokal, Radio Lokal, dan *Website* di internet), memberikan bimbingan dan penyuluhan berupa pelatihan berbahasa asing dan pemberian bantuan usaha kepada masyarakat lokal di objek wisata alam Bantimurung, melakukan pengembangan penangkaran kupu-kupu berupa penanaman kembali pohon-pohon tmtuk mengganti pohan-pohon yang dijadikan bangunan fasilitas penunjang wisata.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros yaitu:
 - a. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pengembangan objek wisata pada Dinas Kabupaten Maros yaitu (1) sarana dan prasarana objek Wisata yang lengkap demi memberikan rasa aman dan nyaman pada para pengunjung.(2) Potensi Wisata yang beraneka ragam seperti atraksi wisata, atraksi budaya, atraksi kesenian (ritual adat).(3) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan objek wisata alam Bantimurung.
 - b. Faktor-faktor yang menghambat peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata Bantimurung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yaitu: (1) Kurangnya koordinasi yang belum “lengkap antara pemerintah Daerah dan pihak swasta. (2) Kurangnya SDM yang
 - c. berkualitas, (3) Keterbatasan dana dalam pengembangan potensi objek wisata alam Bantimurung.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka saran dari penulis yaitu:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Maros hendaknya melakukan promosi pariwisata tidak hanya terbatas dalam negeri saja akan tetapi sampai tingkat internasional,
2. Pemerintah Daerah hendaknya banyak melakukan kerjasama pada instansiinstansi terkait yang berada di luar kota Makassar.
3. Dinas Pariwisata hendaknya melakukan pelatihan intensif kepada pemandu-pemandu wisata, khususnya bagi pemandu wisatawan asing
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Maros harus mendorong kepada pengelola tempat-tempat bersejarah untuk melestarikannya, memberikan penghargaan kepada pengelola
5. Bagi pengelola objek wisata alam Bantimurung, agar dalam mengelola objek wisata hendaknya lebih ditingkatkan kualitas pelayanannya, misalnya dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan kualitas potensi daya tarik wisata dan menambah jumlah fasilitas permainan anak yang dibuat secara khusus sehingga memberikan banyak pilihan kepada pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, J dan Weber, H. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Fandeli.Chafid, 1999. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*.Yogyakarta: Liberty
- Ilyas, Muhammad. 2009. *Strategi Pengembangan Pariwisata Kepulauan Togeang di Kabupaten Tojo Una-Una*. Tesis. Makassar: Program Studi Perencanaan, Pengembangan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Karyono, A Hari. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut-H/2004 tanggal 18 Oktober 2001 Tentang Bantimurung sebagai Taman Nasional
- Kihin, Ahyani Triyana. 2013. *Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata & Kominfo Kota Samarinda Dalam Pelestarian Budaya Adat Dayak Kenyah di Kawasan Budaya Pampang*.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi penelitian Kualitatif*; Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha,Taliziduhu, 2003, *Kybermology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Pendit, Nyoman S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita "
- _____,1999. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengembangan potensi pariwisata
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rivai, Veitzhal, 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Salam, Dharma Setyawan, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Sihite, Richard. 2000. *Tourism Industry*. Surabaya : SIC.

Soekadijo,1997. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto,Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada '

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syafi'inu, Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT. Refrka Aditama.

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

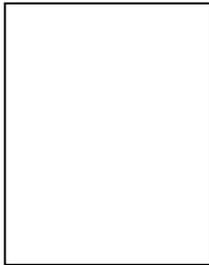
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem

Wahab, Salah, 2003, *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Yoeti, Oka A, 2001. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

[Http://adamaminbahar.blogspot.com/2012/02/pengertian-pemerintahan.html?m-1](http://adamaminbahar.blogspot.com/2012/02/pengertian-pemerintahan.html?m-1)

RIWAYAT HIDUP



Hasni Maddimunri lahir di Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Pada tanggal 18 Juli 1991 .Anak ke empat dari lima bersaudara. Buah hati dari pasangan ayahanda Hasan Maddimunri, S.Pd (Alm) dan Ibunda Maniaga Daeng Matta.

Pada Tahun 1997, Masuk Sekolah Di SD No. 39 Inpres Bontokappong, Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dan tamat Pada tahun 2003. Pada Tahun 2003 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bantimurung dan tamat, pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Maros pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 melanjutkan Pendidikan Di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan penulis berhasil menyusun sebuah skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros”. Dan di wisuda pada tahun 2015.